

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR BALAI TAMAN
NASIONAL GUNUNG PALUNG KECAMATAN SUKADANA
KABUPATEN KAYONG UTARA
(Studi Kasus Desa Gunung Sembilan)**

*Empowering Communities Around the Park District National
Mountain Trench Sukadana Kayong District North
(Nine Mountain Village Case Study)*

Yudhi Dwi Sepriyanto¹, Prof. Dr. H. Arkanudin, M.Si², Drs. Sudirman, M.Si³

Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Program Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Balai Taman Nasional Gunung Palung merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus martabatnya secara wajar, sehingga masyarakat dapat hidup mandiri serta benar-benar memutuskan untuk menerima, memilih atau bahkan menolak tawaran kerjasama apabila memang tidak dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan nasional. Namun, kapasitas masyarakatnya untuk mengelola masalah dan mencari solusi dengan kemampuan sendiri masih sangat kurang dan perlu bimbingan, rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program masih sangat rendah walaupun Pemerintah sudah memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan Balai Taman Nasional Gunung Palung. Dimasa mendatang diharapkan masyarakat sekitar telah benar-benar dapat memanfaatkan potensi di sekitar Taman Nasional Gunung Palung bagi pemberdayaan dan sebagai wadah pengembangan kemandiriannya.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat

¹ PNS Taman Nasional Gunung Palung

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

PENDAHULUAN

Taman Nasional Gunung Palung Kalimantan Barat, daerah yang belum tersentuh *illegal logging*, atas dasar analisis GIS diperoleh data hanya tinggal kurang lebih 28.800 hektar atau 32 % dari luas total Taman Nasional Gunung Palung 90.000 ha (perhitungan pada Juni 2009/BTNGP). Bila terus dibiarkan, jumlah kerusakan akibat *illegal logging* ini akan terus bertambah. Terlihat secara nyata bahwa saat ini masyarakat sekitar hutan semakin merasakan dampak langsung akan adanya kerusakan hutan, karena ekosistem kehidupan mereka telah mengalami perubahan dan penurunan fungsi yang demikian cepat dan besar. Adanya bencana banjir dan tanah longsor merupakan salah satu akibat langsung yang membawa kerugian, baik finansial maupun mental, tidak hanya bagi masyarakat sekitar hutan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Selain itu, terjadinya pembalakan secara besar-besaran terhadap hutan yang melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar masyarakat itu sendiri yang dilakukan secara legal atau dalam bentuk yang *illegal*, yang menambah tingkat interaksi masyarakat desa hutan dengan pihak luar semakin intensif.

Taman Nasional Gunung Palung merupakan paru-paru dunia untuk pelestarian hutan dan merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang memiliki keaneka-ragaman hayati bernilai tinggi dan berbagai tipe ekosistem antara lain hutan mangrove, hutan rawa, rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan pamah tropika, dan hutan pegunungan yang selalu ditutupi kabut. Taman nasional ini merupakan satu-satunya kawasan hutan tropika dipterocarpus yang terbaik dan terluas di Kalimantan yang masih berupa hutan primer yang tidak terganggu aktivitas manusia dan memiliki banyak komunitas tumbuhan dan satwa liar.

Masyarakat sekitar hutan pada umumnya memiliki bentuk aktivitas tradisional pertanian ladang sebagai pilihan utama yang dilakukan setiap tahun guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semakin berkembangnya kehidupan dan bertambahnya kebutuhan hidup keluarga, akan membutuhkan lahan yang lebih luas untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang kemudian ikut berperan serta dalam mendorong masyarakat untuk melakukan pembukaan hutan. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, semakin banyak masyarakat lokal yang secara genap menuntut haknya dalam hal pengelolaan hutan, mereka yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat merasa mendapatkan angin segar untuk ikut ambil bagian. Sebagai akibatnya, penjarahan hutan dan perambahan liar oleh masyarakat semakin tidak dapat dikendalikan hampir di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Belum lagi dengan adanya pihak dari luar masyarakat yang ikut mengambil kesempatan pada kondisi semacam ini, yang kemudian dengan mengatasnamakan masyarakat turut serta dalam eksploitasi sumberdaya hutan.

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan tingginya tekanan akan kebutuhan hidup, mengakibatkan masyarakat penebang pada umumnya sangat bergantung hutan yang ada di sekitarnya. Dengan adanya pemberantasan *illegal logging* tentunya akan membuat masyarakat semakin tidak berdaya dan semakin miskin karena belum terbiasa dengan pekerjaan lain. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang dihadapi dewasa ini. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan diri si miskin. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan tersebut disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan dll. Dengan begitu, segala aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan hidupnya sangat sulit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, karena penelitian deskriptif mendasar analisisnya pada data yang dikumpulkan berupa kata-kata,

gambar dan bukan angka-angka untuk mendapatkan deskripsi yang objektif. Penelitian ini hanya meneliti satu variabel dan bertujuan mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Balai Taman Nasional Gunung Palung Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara (Studi Kasus Desa Gunung Sembilan).

Subjek Penelitian, penelitian dilakukan terhadap masyarakat yang mata pencaharian sebelumnya mengandalkan dari menebang pohon yang berada di kawasan Balai Taman Nasional Gunung Palung Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara (Studi Kasus Desa Gunung Sembilan). Sehingga merekalah yang menjadi subjek penelitian ini. Dalam hal ini subjek penelitian atau yang menjadi informan berjumlah 20 orang. Teknik dan Alat Pengumpulan Data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, dan teknik dokumentasi. Adapun alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah panduan observasi, panduan wawancara dan kamera, serta tape recorder. Panduan observasi digunakan untuk mengamati objek dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis. Panduan wawancara digunakan untuk mencari data sebagai perbandingan yang ditujukan kepada objek penelitian. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat disekitar Balai Taman Nasional Gunung Palung. Penggunaan kamera atau tape recorder dalam hal ini untuk merekam dan untuk menampilkan bukti fisik di lokasi penelitian. Teknik Analisis Data, setelah data yang diperlukan sebagai bahan analisis diperoleh, maka kegiatan selanjutnya adalah mentranskrip data dari hasil rekaman yang ada ke dalam data tertulis. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi hasil transkrip tadi untuk melihat apakah anjuran tersebut salah satu kategori Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Balai Taman Nasional Gunung Palung Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara (Studi Kasus Desa Gunung Sembilan). Kegiatan selanjutnya adalah mengklasifikasikan data yaitu dengan menggolongkan bagian-bagian ujaran subjek berdasarkan kategori strategi komunikasi yang telah dibuat. Data yang telah diklasifikasikan berdasarkan hasil transkrip kemudian diberi kode tertentu sesuai dengan urutan yang ditetapkan oleh peneliti.

Kegiatan selanjutnya adalah memilih data utama untuk penelitian kemudian dilakukan analisis data berdasarkan acuan teori yang dikemukakan dalam bagian kajian pustaka penelitian ini. Supaya kegiatan analisis data menghasilkan deskripsi sesuai dengan yang hendak dicari dalam penelitian. Maka untuk kegiatan analisis diperlukan pegangan tertentu. Dalam hubungan ini, pegangan yang digunakan untuk acuan menganalisis data penelitian ini dikembangkan teori-teori yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan pegangan analisis data. Penelitian ini adalah perpaduan teori tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Gunung Palung Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara (Studi Kasus Desa Gunung Sembilan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan kawasan hutan tidak dapat dipengelola sendiri oleh aparat kehutanan, dan pengalaman memberikan pelajaran bahwa dalam pengelolaan kawasan hutan, di diperlukan dukungan nyata dari para pihak, khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan. Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan, mempunyai potensi dan kearifan tradisional dalam memanfaatkan sumberdaya alam hutan secara lestari, namun adanya desakan kebutuhan dan masuknya faktor dari luar, mendorong masyarakat memasuki kawasan hutan tanpa ijin.

Hal di atas mengakibatkan kawasan hutan dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi baik kualitas maupun kuantitas, bahkan perambahan hutan dan penebangan hutan tanpa ijin telah memasuki kawasan hutan konservasi, yang semestinya kita pertahankan dan lestarikan. Akibat dari degradasi dan deforestasi kawasan hutan konservasi, banyak dijumpai kondisi kawasan konservasi yang tidak sesuai lagi dengan status dan fungsinya. Pemerintah dan para pihak berkepentingan terhadap kelestarian kawasan hutan konservasi guna menjaga ekosistem sekaligus

mengatur hidroorologi, sehingga semua kehidupan baik yang ada di dalam dan di luar hutan dapat berjalan dengan baik, disisi lain masyarakat membutuhkan ruang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar. Bertitik tolak dari berbagai kepentingan di atas, ditempuh kebijaksanaan bahwa pengelolaan kawasan hutan diperlukan partisipasi dan keterlibatan aktif dari masyarakat dan para pihak terkait, yang diwadahi dalam program pemberdayaan masyarakat, sekaligus dimaksudkan agar kawasan hutan tetap lestari dan masyarakat terpenuhi kesejahteraannya.

A. Pola Pemberdayaan Masyarakat

Pola pemberdayaan masyarakat dilakukan secara seimbang, serasi, dan simultan, mencakup :

1. Pengelolaan usaha berbasis sumber daya hutan yang efisien dalam arti mampu menghasilkan keuntungan untuk kemakmuran masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
2. Pemanfaatan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya hutan demi menjaga kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan kearifan tradisional kaitannya dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Pola pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan mempunyai 11 (sebelas arah), meliputi:

1. Pemilikan dan pemberdayaan masyarakat dalam arti bahwa pemberdayaan diutamakan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, daya saing dan partisipasi masyarakat kelas bawah.
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan serta mengembangkan peran serta masyarakat, dalam arti semakin memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap masyarakat kelas bawah yang selama ini terpinggirkan dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan kehutanan.
3. Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat, dalam arti semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan.
4. Memperhatikan potensi, lokasi, aspirasi, dan tuntutan masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi merupakan upaya pemberdayaan Warga Masyarakat Desa di sekitar kawasan hutan konservasi yang bertumpu kepada kekuatan lokal, baik kekuatan lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan aset pengalaman, maupun kemampuan manajemen kelembagaannya.
5. Pemberdayaan Masyarakat haruslah merupakan program pembelajaran yang dilakukan melalui suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis dengan menerapkan prinsip “menolong mereka sendiri” (*self-help*) dan berlandaskan pada peningkatan kemampuan yang menghasilkan pendapatan (*income generating capacity*), sehingga mereka mampu menjangkau (*akses*) terhadap sumber daya, permodalan, teknologi dan pasar.
6. Mampu mengakses terhadap permodalan, artinya mampu mendapatkan modal yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya dari lembaga keuangan formal.

7. Mampu mengakses terhadap teknologi, artinya mampu menerapkan sistem budidaya atau cara-cara kerja yang bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat memberikan nilai tambah.
8. Mampu mengakses pasar, artinya mampu menjual hasilnya dengan lancar dan dengan harga yang layak serta berkelanjutan.
9. Mendorong dan membimbing masyarakat Desa di dalam dan di sekitar kawasan konservasi agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara individu maupun kelompok. Anggota kelompok haruslah terdiri dari pribadi-pribadi yang saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama, sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi. Bimbingan dan bantuan kemudahan yang diberikan oleh instansi pembina atau pihak lain haruslah yang mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian.

Kelompok yang telah terbentuk dapat diklasifikasikan dalam 4 tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat 1 : Kelompok Pemula
 - b. Tingkat 2 : Kelompok Lanjut
 - c. Tingkat 3 : Kelompok Madya
 - d. Tingkat 4 : Kelompok Utama
10. Menumbuhkembangkan gabungan atau jaringan antara kelompok atau asosiasi Pemberdayaan Masyarakat. Kelompok-kelompok yang sudah tumbuh didorong dan dibimbing agar mau dan mampu bekerjasama antar kelompok dalam bentuk organisasi yang lebih besar, yang disebut gabungan kelompok atau asosiasi. Dengan bergabung dalam asosiasi akan mampu memberi manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya antara lain:
 - a. Menghimpun modal usaha yang lebih besar.
 - b. Memperbesar skala usaha.
 - c. Meningkatkan posisi tawar-menawar (*bargaining position*).
 - d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha.
 Terbentuknya gabungan kelompok/asosiasi peserta pemberdayaan masyarakat hendaknya atas dasar kebutuhan atau kepentingan kelompok itu sendiri.
 11. Menumbuhkan Lembaga Ekonomi Formal.
 Gabungan kelompok/Asosiasi Peserta Pemberdayaan Masyarakat didorong agar mereka mau dan mampu menjadi satu lembaga ekonomi formal, yang antara lain adalah Koperasi. Untuk mencapai itu perlu dilakukan berbagai latihan atau kursus yang dirancang secara khusus bagi para pengurus dan anggota Gabungan Kelompok/Asosiasi, antara lain adalah:
 - a. Kursus bisnis dan kewirausahaan.
 - b. Magang (manajemen usaha koperasi/manajemen simpan pinjam Koperasi).
 - c. Kursus manajemen partisipatif (Gugus kendali mutu).
 - d. Kursus pengembangan motivasi berprestasi (*Achievement Motivation Training*).

Peningkatan SDM selain berkaitan dengan peningkatan produktivitas petani juga diarahkan pada peningkatan partisipasi politik petani dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka melalui organisasi petani mandiri. Peran aktif pemerintah dalam peningkatan SDM petani antara lain melalui reorientasi sistem penyediaan layanan dan pendanaan sistem informasi pertanian.

Revitalisasi kinerja kelembagaan dan penyuluh pertanian akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan SDM pertanian. Selain itu pemberian ruang yang cukup untuk sektor swasta melalui privatisasi penyuluhan juga akan mendorong terciptanya penyediaan layanan

informasi pertanian yang lebih kompetitif, efisien, dan efektif. Peningkatan SDM petani dan pertanian sangat erat kaitannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan/ community empowerment. Dalam pengertian luas pemberdayaan merupakan proses memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan.

Lingkungan strategis mencakup lingkungan dan mekanisme produksi, ekonomi, sosial, dan ekologi. Terkait mekanisme produksi pemberdayaan semestinya mendorong petani agar mampu memanfaatkan sumber daya produksi yang dimilikinya sehingga mampu berproduksi secara efisien dan menjamin pemenuhan pangan serta memperoleh surplus yang dapat dipasarkan. Masyarakat umumnya memiliki institusi lokal yang sebenarnya dapat dikaitkan dengan usaha-usaha kerja sama produktif.

Bagaimana pun juga membangun SDM pertanian tidak terlepas dari pembangunan dalam berbagai aspek strategis petani. Yaitu aspek produksi dan ekonomi, sosial, dan ekologi. Keberhasilan penguatan aspek tersebut yang akan menentukan apakah kualitas SDM pertanian dan pedesaan akan meningkat nyata atau berjalan di tempat.

Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Palung (Desa Gunung Sembilan) dengan Membangun Model Desa Konservasi (MDK)

1. Program Kegiatan

Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) di Desa Gunung Sembilan bertujuan agar pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Palung dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat berfungsi secara optimal dan lestari, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dan terbangunnya kesadaran masyarakat melalui aktivitas pembangunan yang dilaksanakan pada Model Desa Konservasi (MDK) dan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Ruang lingkup kegiatan Model Desa Konservasi meliputi :

- Pemberdayaan masyarakat melalui Sembilan tahapan :
- Penataan Ruang/wilayah kelola masyarakat berbasis konservasi
- Pengembangan Ekonomi Pedesaan Berbasis konservasi

2. Tahap Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat Desa Gunung Sembilan akan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 42 (empat puluh) kegiatan rencananya akan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dapat dilihat dari tabel di bawah ini. (terlampir).

3. Lembaga Pelaksana, Kelompok Sasaran, dan Peran Multi Pihak

Pelaksanaan Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) pada dasarnya merupakan kegiatan partisipatif dari berbagai pihak (stakeholders) yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk peran Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Langkah awal dalam pelaksanaan Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kesepahaman dari berbagai pihak (stakeholders) yang terkait, termasuk pemerintah daerah setempat. (Tabel terlampir)

4. Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat melalui Model Desa Konservasi (MDK). Berikut kriteria dan indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat tersebut :

- a. Kriteria Keberhasilan pemberdayaan masyarakat
- b. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat

5. Metode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

- a. Waktu Pelaksanaan

1. Kegiatan Monitoring
2. Kegiatan Evaluasi
- b. Metode Pelaksanaan
 1. Metode Pelaksanaan Monitoring
 2. Metode Pelaksanaan Evaluasi
- c. Objek Monitoring dan Evaluasi

Objek terdiri dari 4 (empat) unsure manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling.

1. Perencanaan/planning
2. Pengorganisasian/Organizing
3. Pelaksanaan/Actuating
4. Pengawasan/ Controlling
5. Data dan informasi yang di dapatkan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan Model Desa Konservasi. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan (asumsi) kriteria dan indikator pemberdayaan masyarakat, antara lain:
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh aspek kegiatan pemberdayaan masyarakat pada semua tahapan yang meliputi :

1. Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - a. Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan implementasi dari Rencana Pengelolaan Taman Nasional Jangka Pendek (tahunan).
 - b. Sistem perencanaan (bottom up, sinergis dengan pembangunan daerah, pentahapan sesuai prioritas pendanaan dan jangka waktu, dll).
 - c. Dukungan dari berbagai pihak sehingga monitoring dilakukan secara partisipatif.
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Merupakan implementasi pelaksanaan rencana tahapan kegiatan, sesuai jangka waktu dan anggaran dari butir 1 diatas, diantaranya meliputi :

- a. Informasi kondisi awal sossebud, perekonomian, mata pencaharian, pendidikan, fasilitas dan infrastruktur yang ada.
- b. Bentuk kegiatan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berdasarkan urun rembuk dengan masyarakat Desa Gunung Sembilan. Beberapa contoh kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain : pipanisasi air bersih kerumah warga, pembuatan dan pemeliharaan saluran irigasi, pelatihan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pendampingan kelompok tani, pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata dan berbagai kegiatan lainnya.

- Jenis/bentuk kegiatan pemberdayaan
- Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan/pelaksana pemberdayaan

- c. Letak Desa

Desa Gunung Sembilan terletak di Kecamatan Sukadana, kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.

- d. Kelembagaan pemberdayaan masyarakat

Saat ini di Desa Gunung Sembilan belum ada kelembagaan khusus yang menangani pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan

sumberdaya manusia, Kelembagaan yang ada adalah kelembagaan formal pemerintahan, adat dan seni budaya.

e. Fasilitator

Pendampingan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan bantuan kegiatan pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan dengan mendayagunakan PEH dan POLHUT yang ada di UPT.

- Apakah tenaga fasilitator cukup memadai dari kualitas dan kuantitas
- Frekuensi pendampingan

f. Peningkatan kapasitas fasilitator

Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti fasilitator seperti: pelatihan budidaya lele, interpreter, pembuat pupuk organik dll.

g. Komitmen para pihak di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Dukungan konkrit dalam kelancaran dan keberhasilan pemberian bantuan terutama di luastupoksi kehutanan berupa apa saja.

h. Penggunaan sumberdaya/fasilitas

Merupakan bentuk penyediaan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat baik berupa dana, tenaga professional/pendampingan, maupun sarana prasarana pemberdayaan masyarakat, antara lain sumber dan besar dana, jumlah bantuan tenaga profesional dan keahliannya serta lama waktunya.

i. Pemasaran produk

Apakah sudah ada pemasaran produk dan pembentukan jaringan usaha dari kegiatan pemberdayaan masyarakat.

j. Respon masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dinilai melalui beberapa indikator, antara lain

1. Terbangunnya kesepahaman dengan para pihak (stakeholders) terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Telah terdapat fasilitator/pendamping yang efektif bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan.
3. Terbangun dan berkembangnya kelembagaan masyarakat ditingkat desa dan berangsi dengan baik.
4. Kapasitas SDM (Pengelola dan Masyarakat) meningkat
5. Keterampilan dan pengetahuan SDM (Pengelola dan Masyarakat) meningkat.
6. Kegiatan usaha ekonomi masyarakat telah berkembang.
7. Terbangunnya jejaring kerja dengan pola kemitraan.
8. Terpeliharanya fungsi kawasan hutan konservasi
9. Terbentuknya dan berfungsinya PAMSWAKARSA.

Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Palung (Desa Gunung Sembilan) dengan Memberikan Pendidikan dan Latihan. Pelaksanaan diklat pengembangan pemberdayaan masyarakat, dilakukan secara bertahap, adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Prakondisi
2. Persiapan
3. Perencanaan Kegiatan
4. Pelaksanaan Kegiatan
5. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

6. Pemanfaatan Hasil Kegiatan
7. Pendewasaan Kelompok
8. Pengembangan Jejaring dan Kemitraan Usaha
9. Peningkatan Daya Saing

B. Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Palung (Desa Gunung Sembilan) dengan Program Demplot Pertanian Organik

Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung dalam meningkatkan kesejahteraan dan memajukan usaha tani mereka antara lain adalah keterbatasan sumber daya lahan yang ada yang dapat dikelola, adanya konflik batas kampung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Palung, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha ekonomi serta keterbatasan informasi yang benar dan tepat mengenai perkembangan pembangunan pertanian sehingga para petani sangat lamban dalam usaha melakukan pemecahan yang dihadapi di lapangan.

Di samping itu, kemampuan para petani dalam mengorganisir kegiatan secara berkelompok sangat lemah, dan para petani dari masing-masing kampung lebih bekerja secara sendiri-sendiri dengan mempraktekkan pengalaman mereka masing-masing. Kondisi ini baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan terjadinya perambahan kawasan untuk lahan pertanian yang mengakibatkan kebakaran hutan dan praktek pertanian yang kurang ramah lingkungan. Sehingga dapat menjadi sebuah ancaman terhadap kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Palung kedepan. Maksud dilakukannya kegiatan pembuatan demplot pertanian organik di desa penyangga Taman Nasional Gunung Palung adalah sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan sehingga gangguan dan ancaman terhadap kawasan dapat diminimalisir.
- b. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya menjaga dan melestarikan kawasan Taman Nasional Gunung Palung
- c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam upaya pengelolaan kolaboratif.

Sedangkan Tujuan pelaksanaan kegiatan pembuatan demplot pertanian organik di desa penyangga Taman Nasional Gunung Palung adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung.

Metode demonstrasi merupakan suatu bentuk metode penyuluhan yang memperlihatkan cara dan penyerapan teknologi baru yang lebih baik. Demonstrasi bukan suatu percobaan atau pengujian, tetapi suatu pendidikan lewat suatu percontohan tentang "cara" dan "hasil" penerapan teknologi yang telah terbukti menguntungkan serta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Demonstrasi Plot dilakukan oleh dengan luas areal 0,1 – 0,5 ha. Demplot pertanian organik yang akan diterapkan merupakan penerapan teknologi pertanian yang berbeda dari pertanian secara tradisional, dengan harapan menjadi contoh untuk diterapkan oleh masyarakat. Demplot Pertanian Organik dibuat sesederhana mungkin dengan menyesuaikan sumberdaya di lapangan.

Pelaksana pembuatan dan pengembangan pertanian organik bukanlah penyuluh atau pihak lain, tetapi kelompok masyarakat sendiri. Tujuannya, agar masyarakat mampu menerapkan pertanian organik dalam lingkungannya masing-masing. Teknologi yang diterapkan dalam demplot bersifat lokal, artinya sesuai dengan kondisi lingkungan

masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada, sehingga dapat dengan mudah diadopsi. Pelaksanaan demplot dirancang bersama oleh kelompok masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Adapun strategi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diantaranya :

- (1) Melakukan penguatan dan pendampingan terhadap kegiatan pertanian masyarakat dengan mengoptimalkan lahan yang ada di desa penyangga Taman Nasional Gunung Palung, dimana hasil produksinya dapat diserap oleh pasar.
- (2) Melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap kegiatan pengembangan komoditas pertanian masyarakat setempat yang berorientasi pasar.
- (3) Penguatan kelembagaan kelompok dalam upaya meningkatkan posisi tawar petani dalam memasarkan hasil pertaniannya.

PENUTUP

Secara umum kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan martabatnya secara wajar, sehingga masyarakat dapat hidup secara mandiri, dalam arti berani memutuskan untuk menerima, memilih atau menolak tawaran kerjasama kalau memang tidak menguntungkan, dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya kesimpulan dapat dirinci sebagai berikut: 1.Kapasitas masyarakat untuk mengelola masalah dan mencari solusi dengan kemampuan sendiri masih sangat kurang karena masih perlu bimbingan dan bantuan orang lain, 2.Rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang diperuntukkan bersama masih sangat rendah, 3.Pemanfaatan sumber daya dalam arti sudah mampu menghasilkan keuntungan khususnya bagi masyarakat di sekitar Balai Taman Nasional Gunung Palung, 4.Pemerintah sudah memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan Balai Taman Nasional Gunung Palung, 5. Dengan adanya Balai Taman Nasional Gunung Palung, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat. 6. Masyarakat sudah menyadari manfaat dari Balai Taman Nasional Gunung Palung sebagai wadah bagi pengembangan kemandirian dan sumber daya manusia untuk menunjang kehidupan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S. 1998, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bina Aksara
- Ahmad NS. 2011. *Pendidikan dan Masyarakat*, Yogyakarta: Sabda Media
- Bangun K., A dan Wahyu W. 2003. *Illegal Logging* di Propinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif Kriminologi. Jakarta.
- Eddy O.S., H. 2003. *Illegal Logging* di Kalimantan Barat : Perspektif *Criminology*. Proyek ITTO *Illegal Logging* di Kalimantan Barat.
- Edi S. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama
- Effendi, R. 2003. *Studi Sosiologi Masyarakat Sekitar Hutan dalam Upaya Mengatasi Illegal Logging : Studi Kasus di Propinsi Riau*. Bogor
- Fisher, B. A, 1986, *Teori-teori Komunikasi*. Penyunting: Jalaluddin Rahmat, Penerjemah: Soejono Trimbo. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ife J. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Second Edition. Australia: Pearson Education Australia Pty.Ltd
- Hadi S, 1990. *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset
- Huraerah, A. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora
- Mulyana, D. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moloeng L. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, H. 2001, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nurani S. 2010. *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian – Kajian Strategis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Nawawi. I. 2002. *Pembangunan dan Problema Masyarakat Kajian, Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, Surabaya: CV.Putra Media Nusantara
- Person. 2004. *The Intregation of Social Work Practice*, California: Brooks Cole
- Sapariadi, K. 2003. *Langkah Strategis dan Upaya Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia*. Majalah Kehutanan Indonesia Edisi IV 2003. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Setyarno, A. 2004. *Analisis Perubahan Struktural Sistem Sosial Akibat Kejahatan Kehutanan*. Jakarta.
- Suryanto. 2005. *Illegal Logging Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia*. Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan. Kalimantan
- Sugiyono, 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. 1985. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali
- Soemardjan S. 1984. *Setingkat Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yayasan badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Soetarso. 1994. *Praktik Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*, Bandung: Koperasi Mahasiswa Stekes
- Kepmen Kehutanan No.6186/Kpts-II/2002 Tahun 2002 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional Ketapang*.
- No.101/Kpts/VIII/12 Tahun 1984 tentang *Kawasan Taman Nasional Gunung Palung*
- Undang-Undang N0.41 Tahun 1999 Pasal 56 (1) tentang *Kehutanan*.